

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP 07 PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : ANDRIE CESARIO SHOMAD
NIM : 126231134**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP 07 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : ANDRIE CESARIO SHOMAD
NIM : 126231134

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

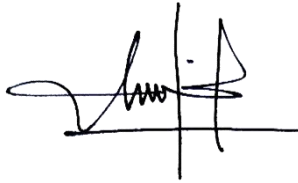
JAKARTA

2024

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP 07 PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line, positioned above a horizontal line.

Andrie Cesario Shomad

126231134

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Elizabeth Sugiarto D. S.E., MSi., Ak., CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi permasalahan atas pengelolaan aset tetap dan menganalisis sejauh mana Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Boalemo telah mengimplementasikan standar yang ditetapkan dalam PSAP No. 07 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPKPD Kabupaten Boalemo dalam mengimplementasikan pengelolaan aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07. Penelitian ini berfokus pada entitas BPKPD Kabupaten Boalemo yang merupakan entitas dengan tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dalam hal penyusunan dan penyajian nilai aset tetap pada laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap oleh BPKPD Kabupaten Boalemo khususnya untuk penerapan kebijakan pengakuan, pengukuran, dan penilaian, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Sedangkan, penerapan kebijakan klasifikasi, pengeluaran setelah perolehan awal, serta penghentian dan pelepasan aset tetap masih belum sesuai dengan standar PSAP No. 07.

Kata Kunci: PSAP No. 07, Aset Tetap, Akuntansi Sektor Publik

ABSTRACT

This research aims to identify the issues related to the management of fixed assets and analyze the extent to which the Financial and Regional Revenue Management Agency (BPKPD) of Boalemo Regency has implemented the standards set forth in PSAP No. 07. Additionally, it seeks to understand the challenges faced by BPKPD of Boalemo Regency in implementing the management of fixed assets in accordance with PSAP No. 07. The focus of this study is BPKPD of Boalemo Regency, an entity tasked with supporting governmental functions in the field of financial and regional revenue management, specifically in the preparation and presentation of the value of fixed assets in financial reports in accordance with government accounting standards. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection methods including interviews, documentation, and observation. The results of this study indicate that the management of fixed assets by BPKPD of Boalemo Regency, particularly in the implementation of policies on recognition, measurement, and valuation, as well as the presentation and disclosure of fixed assets, is in accordance with PSAP No. 07. However, the implementation of policies on classification, expenses after initial acquisition, as well as the cessation and disposal of fixed assets, is still not in accordance with PSAP No. 07.

Keywords: PSAP No. 07, Fixed Assets, Public Sector Accounting

KATA PENGANTAR

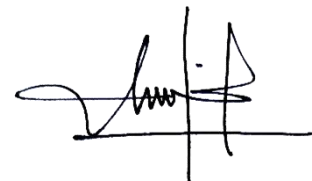
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Elizabeth Sugiarto D. S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 25 Juni 2024



Andrie Cesario Shomad

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07	5
2.2 Aset Tetap.....	5
2.3 Klasifikasi Aset Tetap.....	6
2.4 Pengakuan Aset Tetap	7
2.5 Pengukuran Aset Tetap.....	7
2.6 Penilaian Aset Tetap	8
2.7 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap	9
2.8 Pelaporan Aset Tetap	9
2.9 Penelitian Terdahulu.....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	11
3.1 Metode Penelitian Analisis PSAP No. 07	11
3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1 Klasifikasi Aset Tetap di BPKPD Kabupaten Boalemo.....	14
4.2 Pengakuan Aset Tetap di BPKPD Kabupaten Boalemo.....	17
4.3 Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap di BPKPD	18
4.4 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap di BPKPD	21
4.5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap di BPKPD	24
4.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap di BPKPD.....	27
4.7 Pembahasan Penerapan PSAP No. 07 Terhadap Pengelolaan Aset Tetap di BPKPD Kabupaten Boalemo	28

4.8	Kendala Penerapan PSAP No. 07 Terhadap Pengelolaan Aset Tetap di BPKPD Kabupaten Boalemo	30
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		32
5.1	Simpulan	32
5.2	Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA		34

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya Aset Lain-lain Kabupaten Boalemo Tahun 2020 s.d 2022.....	2
Tabel 2	Rincian Aset Tetap Kabupaten Boalemo Neraca Per 31 Desember 2023 .	14
Tabel 3	Perbandingan Pengklasifikasian Aset Tetap oleh BPKPD Kabupaten Boalemo dengan PSAP No. 07	15
Tabel 4	Perbandingan Pengakuan Aset Tetap oleh BPKPD Kabupaten Boalemo dengan PSAP No. 07	17
Tabel 5	Perbandingan Pengukuran dan Penilaian Penyusutan Aset Tetap oleh BPKPD Kabupaten Boalemo dengan PSAP No. 07.....	19
Tabel 6	Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap oleh BPKPD Kabupaten Boalemo dengan PSAP No. 07.....	23
Tabel 7	Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap oleh BPKPD Kabupaten Boalemo dengan PSAP No. 07.....	25
Tabel 8	Perbandingan Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap oleh BPKPD Kabupaten Boalemo dengan PSAP No. 07.....	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Nilai Kesalahan Pengklasifikasian Aset Tetap dari Tahun 2021 s.d. 2023	16
Grafik 2	Kesalahan Perlakuan Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap dari Tahun 2021 s.d. 2023	24
Grafik 3	Kesalahan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap dari dari Tahun 2021 s.d. 2023	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Boalemo	13
----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyajian laporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan salah satu aspek kunci dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah yang baik. Laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan instansi pada periode tertentu, tetapi juga memberikan dasar untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian keuangan yang efektif.

Aset tetap memegang peranan penting dalam operasional dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam mendukung pencapaian tujuan dan fungsi pelayanan publik. Menurut Winarno (dalam Lauma *et al*, 2016:84), aset tetap adalah elemen kunci dalam aset pemerintah daerah karena memiliki nilai yang sangat penting dalam Neraca. Keberadaan aset tetap memiliki dampak besar terhadap kelancaran operasional pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu, sistem manajemen atau pengelolaan aset tetap daerah harus handal sebagai sarana untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Dwi, Yulinartati, & Elok, 2020). Menurut Aurelia & Setijaningsih (2020), peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan.

Pemerintah perlu memperhatikan aspek pengelolaan dalam kaitannya dengan keberadaan aset tetap yang dimilikinya. Pengelolaan Aset tetap harus diiringi dengan pencatatan yang tepat sesuai dengan peraturan atau standar yang ada. Pengelolaan aset tetap memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, mulai dari pengakuan awal, penilaian, penyusutan, hingga akhirnya penghapusan atau penjualan aset. Setiap tahapan ini memerlukan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang relevan dan kebijakan internal yang tepat. Pemerintah terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana (Putri, Sari, & Sulistyowati, 2016)

Pengelolaan aset tetap oleh Pemerintah Indonesia telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan terkait akuntansi aset tetap dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07. PSAP No. 07 khususnya mengatur tentang

pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dituntut pula untuk menyusun dan menyajikan nilai aset tetap pada laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Boalemo merupakan instansi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah dengan salah satu fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan daerah. Salah satu unit kerja pada BPKPD Kabupaten Boalemo, yaitu Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bidang BMD) yang memiliki tugas secara umum untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, pengamanan, pemanfaatan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan barang milik daerah.

Penyelenggaraan dan pengelolaan barang/aset milik daerah yang dilakukan oleh BPKPD diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap ini sering sekali dijumpai berbagai permasalahan yang mengakibatkan penerapannya tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tidak berjalannya penerapan standar akuntansi pada instansi pemerintah dapat mengakibatkan banyaknya barang/aset milik daerah yang tidak dikelola dengan baik hingga barang/aset tersebut hilang.

Neraca Pemerintah Kabupaten Boalemo menunjukkan nilai aset tetap dan aset lain-lain dari tahun 2020 s.d. 2022, dengan data sebagai berikut:

Tabel 1 Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya Aset Lain-lain Kabupaten Boalemo Tahun 2020 s.d 2022

Uraian	2020	2021	2022
Aset Tetap			
Tanah	153.051.515.272,80	153.654.392.283,80	153.978.124.526,80
Peralatan dan Mesin	425.127.179.581,42	466.285.114.968,89	488.769.788.521,39
Gedung dan bangunan	467.953.542.762,19	510.077.663.637,19	545.746.471.739,19
Jalan, Irigasi, Jaringan	1.313.321.905.480,32	1.342.524.043.901,32	1.375.430.281.903,32
Aset Tetap Lainnya	24.880.357.654,55	26.419.625.154,55	28.349.452.513,55
Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.985.259.634,00	28.893.552.488,00	49.959.925.705,00

Uraian	2020	2021	2022
Akumulasi Penyusutan	-1.054.446.735.984,12	-1.198.665.538.797,10	-1.325.535.714.679,41
Total Aset Tetap	1.361.873.024.401,16	1.329.188.853.636,65	1.316.698.330.229,84
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	23.142.436.639,56	22.932.638.539,56	24.073.196.558,56

Sumber: Laporan Keuangan *Audited* Kabupaten Boalemo 2020, 2021, dan 2022

Tabel 1 menunjukkan nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Boalemo mengalami penurunan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Sedangkan aset lainnya aset lain-lain mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp1.140.555.019,00 atau 4,97% dibandingkan dengan tahun 2021, yang mana akun aset lainnya aset lain-lain ini merupakan akun yang digunakan untuk mencatat aset yang dalam kondisi rusak parah, usang, atau tidak digunakan dalam operasional pemerintah karena sedang menunggu proses pemindahan atau tidak diketahui lokasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan aset tetap yang terjadi di Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu 2021 s.d. 2022, antara lain yaitu pencatatan perpindahan penggunaan kendaraan dinas antar instansi yang tidak tertib karena adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dimutasi ke instansi lain dan adanya ASN yang telah pensiun namun kendaraan dinas tetap dibawa oleh ASN tersebut (Infopublik.id, 2021). Terdapat pula aset yang tidak diketahui keberadaannya dan aset yang masih dipegang oleh ASN yang telah pensiun. Belum maksimalnya pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilakukan oleh para pimpinan instansi menjadi salah satu penyebab permasalahan ini belum terselesaikan hingga saat ini (Digimedia.id, 2023). Selain itu, berdasarkan Keputusan Bupati Boalemo Nomor 023/438/XII/2023 tentang penetapan hasil inventarisasi barang milik daerah tahun 2023 menunjukkan masih terdapat barang milik daerah yang tidak diketahui keberadaannya, terdapat pengeluaran beban operasional atas aset tetap tanah, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang seharusnya dibebankan, serta masih terdapat kesalahan pencatatan pengklasifikasian jenis aset.

Berdasarkan hal tersebut menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo. Penelitian ini merujuk kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan Moray, Sabijono, & Tangkuman (2021) terkait analisis kesesuaian penyajian laporan keuangan Puskesmas Sagerat dengan PSAP No. 07. Penelitian tersebut menyampaikan bahwa komponen-komponen aset, termasuk

klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian aset tetap, pengeluaran aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta pengungkapan aset tetap yang disajikan oleh Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan prinsip-prinsip PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penerapan PSAP No. 07 pada instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dari sisi pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga BPKPD dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas. Hal tersebut diharapkan juga berdampak bagi pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat serta mewujudkan *good governance*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi permasalahan atas pengelolaan aset tetap dan menganalisis sejauh mana BPKPD Kabupaten Boalemo telah mengimplementasikan standar yang ditetapkan dalam PSAP No. 07 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPKPD Kabupaten Boalemo dalam mengimplementasikan pengelolaan aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07. Dengan adanya hasil analisis ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait tentang pengelolaan aset tetap menurut standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, baik dari sisi instansi dan pemerintah daerah terkait, akademis, maupun peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurelia, L., & Setijaningsih, H. T. (2020). Analisis Pengaruh Struktur Aset, Pertumbuhan Aset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 801 - 807.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua. (2014). Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
- Carolina, Manossoh, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 74-80.
- Delcoure, N. (2013). *The Determinants of Capital Structure in Transitional Economics, Internasional Review of Economics and Finance*. Article in press.
- Harahap, S. (2011). *Teori Akuntansi. Edisi Revisi Penerbit*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isma, B., & Saleh, M. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Berdasarkan PSAP No 07 Terhadap Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di Kab. Aceh Tengah. *JIMEKA*, 74-86.
- Keputusan Bupati Boalemo Nomor 023/438/XII/2023 Tentang Penetapan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2023. (2023). Kabupaten Boalemo.
- Koagouw, E. H., Manossoh, H., & Wokas, H. R. (2023). Evaluasi Penerapan PSAP NO. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 1615-1624.
- Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Accountability*, 84-97.
- Miles, M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moray, C. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA*, 433-444.
- Ningtyas, J. D., & Syuhada, H. (2020). Analisis Pengelolaan Fixed Asset Pada Disparpora Kabupaten Batang Berdasarkan PSAP No 7 (Studi Kasus Di Kawasan Objek Wisata Pantai Sigandu). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, ISSN: 1693-9352.
- Peraturan Bupati Boalemo Nomor 105 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua. (2019). Kabupaten Boalemo.

- Peraturan Bupati Boalemo Nomor 28 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaL. (2016). Kabupaten Boalemo.
- Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. (2023). Kabupaten Boalemo.
- Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaL. (2015). Kabupaten Boalemo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi. (2010). Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 07 Tentang Aset Tetap. (2010). Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
- Putri, R. A., Sari, Y. P., & Sulistyowati, D. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenTegal. *Politeknik Negeri Jakarta*, 508-513.
- R.S., D., Yulinartati, & Fitriyah, E. (2020). Penerapan Aset Tetap Berdasarkan SAP 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo. *International Journal of Social Science and Business*, 284-293.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tobari. (2021, Januari 20). *Pemkab Boalemo Tata Kembali Penggunaan Kendaraan Dinas*. Retrieved from infopublik.id: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/504197/pemkab-boalemo-tata-kembali-penggunaan-kendaraan-dinas>
- Umar, H. (2023, Agustus 7). *Temuan BPK, Pemkab Boalemo Buru Aset Daerah yang tak Jelas Lagi Keberadaannya*. Retrieved from digimedia.id: <https://digimedia.id/temuan-bpk-pemkab-boalemo-buru-aset-daerah-yang-tak-jelas-lagi-keberadaannya/>
- Wahyuni. (2013). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.